

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang dalam masa hidupnya senantiasa melakukan interaksi, hidup berdampingan dan membutuhkan antara individu satu dan individu lainnya sehingga mampu membentuk suatu perkumpulan dan secara tidak sengaja dan tanpa disadari membentuk suatu wadah yang disebut organisasi. Organisasi itu pun dapat dijadikan ajang dalam pengembangan kreatifitas dan mengembangkan diri di lingkungan sosial masyarakat dalam berbagai bidang. Organisasi yang ada di lingkungan masyarakat sebenarnya diperuntukkan agar pemuda dapat menyalurkan kreatifitas dan pengembangan diri karena peran dari pemuda dinilai sangat vital dalam pembangunan Indonesia. Pemuda atau generasi muda adalah konsep-konsep yang sering dikategorikan terhadap nilai-nilai.

OKP adalah singkatan dari Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda yaitu sebuah organisasi beranggotakan pemuda-pemuda sebagai wadah pembinaan calon pemimpin masa depan melalui pembentukan mental dan karakter yang berkualitas serta turut ikut dalam mengusahakan sebuah pembangunan bagi bangsa ini. Namun keberadaan dan sosok OKP yang maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing merupakan harapan yang hendak diraih ditengah permasalahan dan potensi yang melingkupi para pemuda Indonesia. Keberadaan OKP memperoleh tempat yang proporsional sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) kepemudaan di Indonesia. Diharapkan, pada masa mendatang OKP benar-benar mampu memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral (*moral*

force), pemerhati sosial (*social control*) dan agen perubahan (*agent of change*) dalam pembangunan nasional. Sejarah mencatat bahwa pemuda telah menorehkan kontribusi historiknya sebagai pelaku utama perubahan di setiap era perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disadari bersama bahwa potensi OKP itu ada, dan terus bertumbuh kembang dari waktu ke waktu. Peran strategis pemuda yang tergabung dalam OKP masih terus diharapkan dalam mengawal perjalanan bangsa ke depan. Pasalnya, tidak hanya pemuda yang ingin melihat kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami kemajuan, tetapi hal itu menjadi keinginan serta kebutuhan seluruh rakyat dan pemerintah. Namun, dalam kenyataannya, harapan tersebut belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Keinginan melihat kiprah optimal dari OKP terkendala oleh berbagai persoalan internal maupun eksternal ke organisasinya. Pembangunan kepemudaan yang telah dilakukan secara bersama, hingga kini masih belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Persoalan kapasitas, karakter, sifat dan daya saing pemuda masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Di negara Indonesia OKP tumbuh subur sebagai salah satu kekuatan sosial politik masyarakat yang cukup diperhitungkan. Potensi pemuda dan OKP yang sangat banyak diharapkan yaitu dapat diandalkan sebagai agen sosial, kekuatan moral dan kontrol sosial. Dari beragam fakta membuktikan bahwa inovasi dan kreativitas pemuda mampu memberikan sumbangsih dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, pemuda juga sudah membuktikan dari catatan sejarah mampu berperan sebagai kontrol sosial, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun roda pemerintahan dan kehidupan bernegara. Kebangkitan Nasional 1908,

Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 hingga Reformasi 1998 dimotori oleh gerakan pemuda. Medan salah satu kota yang tumbuh dan berkembangnya beragam OKP. OKP itu terbentuk dilandasi berdasarkan ideologi nasionalis yang berazaskan Pancasila dengan latar belakang yang berbeda-beda dan dilandasi kesadaran demokrasi maupun yang tidak, menambah jejeran kekuatan massa rakyat yang dikenal berasal dari basis intelektual, moral, kedaerahan, agama dan unsur kepentingan partai politik.

Medan merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara yang menjadi salah satu kota metropolitan yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kota modern di Indonesia, sehingga dapat dilihat ragam aktivitas yang menyangkut sosial politik, ekonomi, pembangunan dan lainnya. Dengan ragam aktivitas tersebut, memberikan peluang terhadap OKP ikut andil dan telah beralih fungsi untuk mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun kelompok lari dari tujuan utamanya tidak sebagai sebuah organisasi yang mengisi dan mempertahankan kemerdekaan malah meresahkan masyarakat sehingga fenomena keberadaan OKP saat ini telah menimbulkan kegelisahan bagi sebagian besar masyarakat akibat pola tingkah laku di level terbawah yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat.

Seperti yang dikatakan Amin (2005:23) bahwa OKP sudah menjadi organisasi preman karena mereka sering melakukan aktivitas premanisme seperti kekerasan, menyakiti dan bahkan membunuh untuk mendapatkan uang serta kekuasaan, disamping itu mereka ikut berpolitik untuk mendapatkan perlindungan dari elite partai, sehingga mereka menjadi *underbow* dari partai itu sendiri, karena

keuntungan yang di dapatkan dari aktivitas ini, maka persaingan dan okupasi ruang publik tersebut tidak dapat dihindarkan.

Ruang publik merupakan ruang terbuka maupun tertutup yang berfungsi sebagai tempat terjadinya interaksi sosial, ekonomi dan budaya seperti pusat perbelanjaan (pasar dan pertokoan), pusat perkantoran, sentra keramaian, terminal transportasi, tempat hiburan, lahan parkir, penjaga malam dan bangunan liar di pinggir jalan protokol. Organisasi-organisasi Kemasyarakatan Pemuda tersebut akan berusaha dan mengambil peran penting agar dapat menjadikan ruang publik tersebut sebagai lahan mencari keuntungan. Selanjutnya Nurfatimah (2011:57) mengatakan bahwa penataan kawasan pantai yang dilakukan oleh investor dengan melibatkan organisasi pemuda dalam pengamanan pembangunan, sehingga memberikan keresahan warga sekitar karena efek pembangunan akan mengganggu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Dikota Medan setidaknya ada 4 (empat) OKP yang memiliki kekuasaan terhadap ruang publik yaitu Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) yang terbilang besar, eksis dan terorganisir di Kota Medan. Seiring perkembangan zaman dan waktu dengan perkembangan sosial politik memberikan celah terhadap OKP untuk memanfaatkan organisasi sebagai wadah dalam mendapatkan keuntungan, karena sudah menjadi rahasia publik bahwa pimpinan dan anggota OKP berlatar belakang dari seorang preman, pengusaha, politikus (kader partai politik) dan dekat aparat penegak hukum sehingga mereka kelihatan kebal hukum.

Sekarang ini di Kota Medan, OKP ini seolah-olah menjadi *Gankster* dan *tempat kumpulan preman*, sehingga orang yang tergabung di dalam suatu OKP memiliki rasa bangga dan secara otomatis memiliki keberanian dalam segala hal, merasa hebat dan berkuasa pada lahan yang telah dikuasai OKP nya. Pola okupasi ruang publik ini dapat kita lihat dengan cara OKP mengklaim ruang publik tersebut dengan membuat plank-plank keorganisasian dan kantor sekretariat di pinggir-pinggir jalan, bahkan mewarnai fasilitas publik seperti tiang listrik dengan simbol-simbol atau lambang keorganisasian.

Dengan adanya simbol atau plank maupun keberadaan kantor sekretariat organisasi tersebut, maka memberikan tanda bahwa ruang publik itu merupakan daerah kekuasaan dari OKP tersebut, segala hal yang menyangkut tentang keamanan, parkir dan toko atau bangunan yang dibangun di tanah milik pemerintah pun dapat diklaim menjadi daerah kekuasaan OKP, sehingga masyarakat yang ingin menggunakan tanah tersebut baik untuk jualan atau hal lainnya wajib untuk membayarkan sejumlah *dana keamanan* kepada OKP dan masyarakat itu sendiri tidak merasa keberatan dengan peraturan tersebut karena dapat mencari rezeki tanpa harus terganggu oleh pemerintah. Sehingga daerah ini merupakan asset yang berharga dan harus dipertahankan. Selanjutnya (2011:25) mengatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) mengandalkan OKP dalam kegiatannya, dimana OKP dapat memberikan rasa aman kepada PKL dengan imbalan memberikan sejumlah duit kepada OKP tersebut.

OKP di Kota Medan sebenarnya merupakan garda atau penyokong garis bawah dari partai-partai politik, sehingga mereka dapat leluasa melakukan okupasi tanpa harus bersinggungan dengan pemerintah atau pihak terkait karena

sudah di *decking* oleh anggota partai yang telah duduk di pemerintahan. Dengan mempertahankan zona kekuasaan atau bahkan untuk memperebutkan ruang publik yang dapat diklaim sebagai tempat mengais rezeki, kerap kali terjadi gesekan-gesekan akibat perebutan lahan dan ego sektoral yang mengakibatkan terjadinya perkelahian dan kerusakan di Kota Medan dan sekali lagi tentunya akan sangat merugikan kepentingan masyarakat serta menimbulkan rasa antipati masyarakat banyak atas peran dan fungsi OKP.

Kejadian pertikaian antara Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dapat dilihat dari berapa kasus yang terjadi antara lain pada tanggal 30 Januari 2016 yang terjadi di jalan Thamrin dan jalan Asia Medan, 17 Oktober 2016 di jalan Bulan Medan Kota selanjutnya 5 September 2017 di Pajak Sambu Medan, tidak dapat dielakkan karena perebutan kekuasaan atas zona tersebut, bahkan dalam bentrok yang terjadi tersebut menimbulkan korban jiwa disamping itu juga untuk mengeksiskan kekuatan dan nama besar OKP tersebut. Disamping itu, okupasi yang dilakukan oleh OKP dilatarbelakangi faktor ekonomi, sehingga mengharuskan mereka untuk menguasai suatu lahan untuk mendapatkan imbalan dari penguasaan lahan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti tersebut, maka dengan sendirinya memberikan ide kepada peneliti untuk mengangkat judul tesis penelitian "*Pola Okupasi Ruang Publik Oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) di Kota Medan*".

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, Keterlibatan OKP pada okupasi ruang publik, keuntungan yang didapat OKP dan proses mempertahankan ruang publik di kota Medan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan dinamika berdirinya OKP di Kota Medan?
2. Seperti apa ragam jenis ruang publik di Kota Medan ?
3. Bagaimana pola okupasi ruang publik oleh OKP di Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menggambarkan latar belakang dan dinamika berdirinya OKP di Kota Medan.
2. Mengidentifikasi ruang publik di Kota Medan
3. Menjelaskan pola okupasi ruang publik OKP di Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memiliki manfaat dan kegunaan bagi khalayak luas baik secara teoritis dan praktis.

a. Secara teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian ilmu Antropologi Politik.

2. Memberikan gambaran dan pemahaman tentang pola okupasi OKP terhadap ruang publik di Kota Medan dengan latar belakang serta keuntungan yang didapatkan dari okupasi tersebut. Sebagai bentuk pemahaman dan sumbangan pengetahuan agar masyarakat kota Medan dapat mengetahui daerah yang diokupasi oleh OKP.

b. Manfaat Praktis:

1. Secara praktis penelitian ini dapat memperkaya kajian penelitian tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda
2. Memberikan pemikiran terhadap masyarakat untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat
3. Sebagai perbandingan kepada peneliti yang ingin meneliti tentang okupasi
4. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister di Program Pasca Sarjana pada prodi Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan